

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan setelah dilakukannya analisis data dan pengujian mengenai Pengaruh Jumlah Penduduk, Kekayaan Daerah dan *Intergovernmental revenue* terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi di Jawa Barat periode 2015-2017, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian secara parsial Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tingkat signifikansi untuk variabel Ukuran Kekayaan Daerah sebesar 0,302 lebih tinggi dari taraf signifikansi yaitu 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel Kompleksitas Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian dapat dilihat bahwa tingginya angka Kompleksitas Pemerintah Daerah tidak menjamin lebih baiknya Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- b. Hasil penelitian secara parsial Kekayaan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tingkat signifikansi untuk variabel Ukuran Pemerintah Daerah sebesar 0,007 lebih tinggi dari taraf signifikansi yaitu 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dapat dilihat bahwa tingginya Ukuran Pemerintah Daerah tidak menjamin lebih baiknya tingkat Kinerja Pemerintah Daerah
- c. Hasil penelitian secara parsial *Intergovernmental revenue* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan tingkat signifikansi untuk variabel *Intergovernmental revenue* sebesar 0,032 lebih rendah dari taraf signifikansi yaitu 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variable

Intergovernmental revenue berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini menganalisis pengaruh dari Jumlah Penduduk, Kekayaan Daerah dan *Intergovernmental revenue* terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Peneliti menyadari bahwa ada keterbatasan dalam melakukan penelitian yang telah dilakukan, adapun keterbatasan penelitian ini adalah:

- a. Ada beberapa daerah yang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disajikan dalam bentuk scan yang hasilnya tidak mudah untuk dibaca sehingga untuk melihat Laporan Operasional (LO) yang digunakan dalam penelitian ini harus memeriksa Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- b. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat saja sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota pada Provinsi lain yang ada di Indonesia.

5.3 Saran

Terdapat saran yang didasarkan pada beberapa keterbatasan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh juga terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD seperti Belanja Modal, Kemakmuran, Karakteristik, Opini Audit BPK dan lain-lain.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak antara lain bagi manfaat praktis:

a. Pemerintah Daerah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah sebagai pengguna Akuntansi Pemerintahan, penelitian ini diharapkan sebagai suatu dorongan untuk meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah agar kualitas laporannya menjadi lebih baik.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai informasi untuk mengetahui tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

